KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Cari Jalan Keluar Lain
Tanggal : Selasa, 08 Maret 2016
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

GEDUNG DPR

DPR Cari Jalan Keluar Lain

JAKARTA, KOMPAS – Dewan Perwakilan Rakyat siap membatalkan pembangunan gedung baru setelah Presiden Joko Widodo memutuskan melakukan moratorium atau penundaan pembangunan gedung pemerintahan. DPR akan mencari jalan keluar lain untuk mengatasi kekurangan ruangan di parlemen.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPR Ade Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3). "Kalau ada moratorium (pembangunan gedung), kami akan taati," ujarnya.

Menurut dia, DPR akan menaati jika pemerintah memutuskan menunda pembangunan Gedung DPR. Terkait kekurangan ruangan yang saat ini menjadi persoalan, pihaknya akan mencari jalan keluar yang lain. "Kekurangan ruangan, kan, tidak harus diatasi dengan membangun gedung. Kami akan cari akal," ujar Ade.

Pimpinan DPR akan segera menggelar rapat bersama para pimpinan fraksi dan pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) untuk membahas kebijakan moratorium pembangunan gedung dan solusi untuk mengatasi kekurangan ruangan.

Sebelumnya, DPR berencana membangun gedung baru karena ruangan yang tersedia sudah tidak cukup untuk menampung anggota, pegawai, tenaga ahli, dan lainnya. Dari total kebutuhan anggaran Rp 1,8 triliun, sebanyak Rp 570 miliar sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Anggota Komisi XI M Misbakhun mengatakan, moratorium pembangunan gedung sudah dibicarakan komisinya dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menurut dia, moratorium bukan berarti sama sekali tidak ada pembangunan gedung pemerintahan.



KUM

Ade Komarudin

"Moratorium ini bukan menunda sama sekali, melainkan selektif. Usulan kami membangun gedung diklat untuk BPK tetap bisa dilaksanakan," tuturnya.

Kendati begitu, Misbakhun menegaskan, anggaran belanja modal kementerian dan lembaga, termasuk DPR, bisa direalokasi. Realokasi juga bisa dilakukan untuk anggaran gedung baru DPR sebesar Rp 570 miliar dalam APBN 2016.

Renovasi

Wakil Ketua BURT dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah mengatakan, kebijakan moratorium pembangunan gedung baru mau tak mau harus berlaku pula untuk DPR.

"Mau bagaimana lagi, kalau pemerintah memutuskan moratorium, DPR harus ikut, sebab semua anggaran memang harus melalui persetujuan bersama. Kita harus melihat juga kondisi keuangan negara," papar Dimyati.

Namun, sebagai konsekuensi, DPR perlu mencari solusi untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana. Dengan demikian, kalaupun pembangunan gedung baru DPR ditunda, mesti ada alternatif lain, yaitu merenovasi beberapa sarana dan prasarana.

"Mungkin judulnya bukan lagi membangun gedung baru, melainkan kita *upgrade* saja beberapa hal," kata Dimyati. Anggaran untuk perbaikan dan peningkatan sarana di DPR pun sudah teralokasi di APBN 2016.

Namun, Dimyati belum dapat merinci sarana yang perlu direnovasi atau ditingkatkan. Hal itu masih harus dibicarakan lebih lanjut dengan pimpinan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR.

Dalam rapat dengan pihak-pihak yang berkepentingan, BURT akan memperhitungkan konsekuensi serta jalan keluar lain. "Nanti akan kami bicarakan lagi, baiknya seperti apa. Apa saja yang bisa diperbaiki dan ditingkatkan selama pembangunan gedung baru harus ditunda," tutur Dimyati. (NTA/AGE)